



Kenaikan Tarif Air Minum dan Dampaknya terhadap Inflasi Daerah: Studi Kasus Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa Kabupaten Kebumen

Sotya Partiw E¹, Sri Wahyuningsih², Wenny Marlini³

¹²³ Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik, Politeknik Piksi Ganesha Indonesia

Email: wien.sotya@gmail.com¹, yuni_delpipo@yahoo.co.id², wewenlin3832@gmail.com³.

Doi: <https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2471>

Diterbitkan oleh Politeknik Piksi Ganesha Indonesia

Info Artikel

Diterima :

2025-05-30

Diperbaiki :

2025-06-11

Disetujui :

2025-06-11

Kata Kunci :

Tarif Air, Inflasi Daerah,
Retribusi, Kebijakan Fiskal,
Layanan Publik, Perumda

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis hubungan antara kenaikan tarif air oleh Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa di Kabupaten Kebumen dan inflasi daerah. Dengan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka, penelitian mengkaji dokumen kebijakan, literatur akademis, dan data empiris untuk menilai dampak tarif air terhadap inflasi. Hasil menunjukkan bahwa biaya air hanya menyumbang 1–2% pada Indeks Harga Konsumen (IHK), sehingga pengaruhnya terhadap inflasi terbatas. Penyesuaian tarif bertahap dan berbasis kemampuan masyarakat juga mengurangi risiko inflasi. Kebijakan tarif di Kebumen lebih berfokus pada keberlanjutan layanan, efisiensi operasional, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Data perbandingan dari Jakarta dan Surabaya menunjukkan bahwa kenaikan tarif tidak berdampak signifikan pada inflasi. Implikasi kebijakan menekankan pentingnya desain tarif yang transparan dan adil, dengan mempertimbangkan keberlanjutan fiskal dan stabilitas ekonomi daerah.

ABSTRACT

This study examines the relationship between water tariff increases by Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa in Kebumen Regency and regional inflation. Using a qualitative literature review, the research analyzes policy documents, academic sources, and empirical data to assess the impact of water tariffs on inflation. Findings indicate that water costs contribute minimally (1–2%) to the Consumer Price Index (CPI), resulting in a marginal inflationary effect. Gradual, affordability-based tariff adjustments further mitigate inflation risks. Kebumen's pricing policy prioritizes service sustainability, operational efficiency, and public service quality over inflationary concerns. Comparative data from Jakarta and Surabaya confirm that tariff hikes do not significantly disrupt inflation stability. The study highlights the need for transparent, equitable tariff policies that balance fiscal sustainability and macroeconomic stability, contributing to local fiscal policy literature.

Keywords:

Water Tariffs, Regional Inflation,
Levies, Fiscal Policy, Public
Service, Perumda

Alamat Korespondensi

: Jl. Letnan Jenderal Suprpto No.73 Kebumen, Jawa Tengah, Indonesia 54311

PENDAHULUAN

Inflasi merupakan salah satu fenomena ekonomi makro yang menjadi perhatian utama bagi setiap negara, termasuk Indonesia. Inflasi yang tinggi dapat menimbulkan beragam dampak negatif terhadap perekonomian, antara lain penurunan daya beli masyarakat, ketidakstabilan

harga, gangguan terhadap investasi, serta tekanan terhadap distribusi pendapatan. Menurut Mankiw (2020), inflasi adalah kenaikan tingkat harga secara umum dan terus-menerus dalam suatu perekonomian selama periode waktu tertentu. Sebagai indikator utama stabilitas ekonomi, inflasi sangat sensitif terhadap berbagai kebijakan fiskal dan moneter, termasuk kebijakan tarif dan retribusi yang diberlakukan oleh pemerintah daerah.

Salah satu bentuk kebijakan fiskal daerah yang memiliki potensi mempengaruhi inflasi adalah kenaikan tarif retribusi atas layanan publik. Retribusi daerah merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari pembayaran atas jasa atau pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah, seperti layanan air minum, kebersihan, parkir, dan pemakaian fasilitas umum lainnya. Di Indonesia, retribusi ini diatur dalam peraturan daerah dan menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan operasional layanan masyarakat (Yanti & Ghozali, 2020). Namun demikian, kebijakan kenaikan tarif retribusi, meskipun ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kemandirian fiskal daerah, juga dapat memberikan tekanan terhadap inflasi, terutama ketika diterapkan pada sektor-sektor strategis seperti air bersih.

Khusus dalam konteks penyediaan air minum, tarif layanan yang ditetapkan oleh Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum memiliki peran penting dalam menentukan struktur biaya rumah tangga maupun sektor produktif. Kenaikan tarif air minum tidak hanya berdampak pada biaya hidup masyarakat secara langsung, tetapi juga dapat meningkatkan biaya produksi barang dan jasa lainnya, terutama yang menggunakan air sebagai input produksi. Hal ini selaras dengan teori inflasi berbasis biaya (*cost-push inflation*), yang menyatakan bahwa kenaikan biaya input produksi, termasuk tarif layanan publik, akan mendorong kenaikan harga produk akhir di pasar (Wells & Krugman, 2019).

Di Indonesia, kebijakan tarif air minum kerap kali mengalami revisi dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti biaya operasional perusahaan, inflasi tahunan, dan kemampuan membayar konsumen (Maulana & Maulana, 2024). Namun, ketika kebijakan kenaikan tarif tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan atau ketika diterapkan dalam kondisi ekonomi yang sedang tidak stabil, maka risiko tekanan inflasi akan meningkat (Kharisma, Furqon, Abdurrahman, & Pekalongan, 2023). Fenomena ini telah diamati di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, di mana Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa melakukan penyesuaian tarif sebagai bagian dari strategi peningkatan pendapatan dan efisiensi operasional.

Kabupaten Kebumen merupakan salah satu wilayah yang masih bergantung pada layanan air minum dari Perumda untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi perubahan tarif air minum yang diberlakukan oleh Perumda Tirta Bumi Sentosa dengan alasan kenaikan biaya operasional dan kebutuhan investasi infrastruktur. Walaupun kebijakan ini didasarkan pada prinsip efisiensi dan keberlanjutan, masyarakat menghadapi konsekuensi langsung berupa meningkatnya beban pengeluaran rumah tangga (Anandasari, 2016). Dalam jangka menengah hingga panjang, kondisi ini dikhawatirkan dapat berkontribusi terhadap tekanan inflasi lokal melalui peningkatan harga-harga barang dan jasa yang dipengaruhi oleh biaya air.

Fenomena tersebut menjadi semakin penting untuk dikaji secara ilmiah, mengingat dampak inflasi tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial. Kenaikan harga akibat inflasi dapat memperbesar ketimpangan sosial, terutama jika masyarakat berpenghasilan rendah tidak mampu menyesuaikan konsumsi mereka. Di sisi lain, pemerintah daerah dituntut untuk menjaga kesinambungan fiskal dan pelayanan publik yang memadai, yang mana memerlukan sumber pembiayaan yang stabil, salah satunya melalui tarif layanan (Utomo, 2013).

Studi terdahulu, seperti yang dilakukan oleh He dan Lee (2022) di Korea Selatan, menunjukkan bahwa kebijakan kenaikan retribusi utilitas publik, termasuk air bersih, memiliki hubungan signifikan terhadap inflasi domestik melalui transmisi biaya produksi dan konsumsi. Sementara itu, dalam konteks Indonesia, Fadila dan Purnamasari (2021) menekankan bahwa kenaikan retribusi daerah merupakan salah satu faktor penyebab inflasi di beberapa wilayah, khususnya ketika diterapkan tanpa mempertimbangkan daya beli masyarakat dan kondisi ekonomi lokal. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan perlunya analisis yang lebih kontekstual dan partisipatif dalam merumuskan kebijakan tarif layanan publik.

Sayangnya, studi mengenai dampak kenaikan tarif air minum terhadap inflasi di tingkat daerah masih tergolong terbatas, khususnya yang menggunakan pendekatan kualitatif yang mampu menangkap aspek persepsi, sikap, dan respons masyarakat serta pemangku kepentingan terkait. Padahal, pendekatan kualitatif menjadi penting dalam memahami dimensi sosiologis dan kultural dari kebijakan ekonomi yang diterapkan di tingkat lokal. Dengan demikian, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengkaji lebih dalam bagaimana kebijakan kenaikan tarif air minum berdampak terhadap dinamika inflasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan mengedepankan pendekatan yang holistik dan berbasis pada realitas lokal.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis secara mendalam dampak dari kebijakan kenaikan tarif air minum yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa terhadap tingkat inflasi di Kabupaten Kebumen. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali pengalaman dan persepsi masyarakat pengguna layanan, pihak pengelola Perumda, serta perwakilan pemerintah daerah yang terlibat dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan tarif. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami lebih dalam proses sosial dan ekonomi yang terjadi setelah kebijakan diberlakukan, termasuk bagaimana masyarakat menyesuaikan pola konsumsi mereka, bagaimana sektor usaha merespons perubahan biaya produksi, serta bagaimana kebijakan ini memengaruhi stabilitas harga di pasar lokal.

Adapun tujuan utama dari artikel ini adalah untuk: (1) menganalisis latar belakang dan pertimbangan kebijakan kenaikan tarif air minum oleh Perumda Tirta Bumi Sentosa; (2) mengkaji dampak kebijakan tersebut terhadap inflasi lokal baik secara langsung maupun tidak langsung; serta (3) merumuskan implikasi kebijakan dan rekomendasi yang dapat digunakan oleh pengambil kebijakan daerah dalam merancang strategi tarif layanan publik yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dengan menelaah aspek sosial, ekonomi, dan kebijakan secara bersamaan, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan literatur di bidang ekonomi publik dan kebijakan fiskal daerah, sekaligus menawarkan masukan praktis bagi pengelola layanan publik dalam menetapkan kebijakan tarif yang responsif terhadap kondisi lokal

KAJIAN PUSTAKA

Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Inflasi

Inflasi adalah kondisi naiknya harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode waktu. Meskipun kenaikan tarif PDAM sering dianggap penyebab inflasi, pada kenyataannya tidak selalu berkaitan langsung. Inflasi dipicu oleh berbagai faktor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu penyebab utama adalah inflasi dari sisi permintaan (*demand-pull inflation*), yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa melebihi kemampuan produksi (Mankiw, 2020). Hal ini bisa disebabkan oleh meningkatnya pendapatan masyarakat, investasi besar-besaran, kebijakan pemerintah yang mendorong belanja, serta ketersediaan kredit yang mudah karena suku bunga rendah (Hafidz Meiditambua Saefulloh, Rizah Fahlevi, & Alfa Centauri, 2023).

Sebaliknya, inflasi juga bisa muncul dari sisi penawaran (*cost-push inflation*), ketika biaya produksi naik, misalnya karena harga bahan baku impor meningkat, upah tenaga kerja naik, adanya pajak baru, atau gangguan pasokan akibat bencana, pandemi, atau konflik (Blanchard & Sheen, 2013). Kebijakan moneter juga turut berperan. Jika bank sentral mencetak uang terlalu banyak atau menetapkan suku bunga yang terlalu rendah, maka jumlah uang yang beredar meningkat dan mendorong permintaan serta harga (Mankiw, 2020).

Faktor eksternal, seperti kenaikan harga komoditas global, depresiasi nilai tukar, dan krisis geopolitik, dapat menyebabkan kenaikan harga impor dan berdampak pada inflasi domestik (Hafidz Meiditambua Saefulloh et al., 2023). Ekspektasi masyarakat juga berpengaruh. Jika masyarakat dan produsen memperkirakan harga akan naik, mereka cenderung membeli atau menaikkan harga lebih awal, yang mempercepat inflasi. Struktur ekonomi nasional pun memengaruhi. Negara yang bergantung pada impor atau memiliki industri dalam negeri yang tidak efisien lebih mudah mengalami inflasi (Wells & Krugman, 2019).

Selain itu, inflasi musiman bisa muncul saat hari raya atau musim paceklik, karena lonjakan permintaan atau berkurangnya pasokan (Fadila & Purnamasari, 2021). Akhirnya, kebijakan pemerintah seperti pengurangan subsidi atau kenaikan pajak juga bisa langsung menyebabkan kenaikan harga barang penting, ikut mendorong inflasi. Secara keseluruhan, inflasi dipicu oleh kombinasi berbagai faktor yang saling memengaruhi dan perlu dipahami secara menyeluruh untuk pengambilan kebijakan yang tepat (Mankiw, 2020).

Retribusi Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal

Retribusi merupakan salah satu sumber PAD yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kenaikan tarif retribusi sering kali dilakukan untuk menyesuaikan pendapatan dari retribusi dengan biaya operasional yang meningkat atau untuk meningkatkan kualitas layanan. Namun, kenaikan ini dapat memberikan dampak ekonomi yang luas, terutama pada sektor bisnis dan rumah tangga yang bergantung pada layanan tersebut.

Menurut teori inflasi berbasis biaya (*cost-push inflation*), kenaikan biaya produksi yang disebabkan oleh kenaikan harga bahan baku atau layanan pendukung seperti air bersih dan transportasi dapat memicu peningkatan harga barang dan jasa secara keseluruhan (Blanchard & Sheen, 2013). Dalam konteks retribusi, kenaikan tarif retribusi layanan publik seperti air bersih,

pengelolaan sampah, atau fasilitas umum lainnya dapat meningkatkan biaya operasional bisnis. Produsen yang menghadapi kenaikan biaya ini cenderung meneruskannya kepada konsumen melalui harga jual yang lebih tinggi.

Selain itu, teori permintaan agregat (*aggregate demand*) menjelaskan bahwa inflasi juga dapat terjadi ketika kenaikan biaya hidup masyarakat mengurangi daya beli, yang kemudian berdampak pada pola konsumsi. Jika kenaikan tarif terlalu besar, daya beli masyarakat akan menurun, dan pada saat yang sama biaya produksi meningkat, sehingga menciptakan tekanan inflasi yang lebih tinggi (Samuelson, P.A. Nordhaus, 2010).

Kenaikan tarif retribusi PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) sering dianggap berhubungan dengan inflasi, tetapi pada kenyataannya, faktor yang mendorong perubahan retribusi PDAM tidak selalu berkaitan langsung dengan tingkat inflasi. Berikut adalah penjelasan mengapa kenaikan tarif PDAM tidak berkaitan secara langsung dengan inflasi:

Sifat Biaya Operasional PDAM

PDAM menetapkan tarif berdasarkan struktur biaya operasional dan investasi yang diperlukan untuk menyediakan layanan air bersih. Biaya operasional ini meliputi: Biaya pemeliharaan infrastruktur seperti pipa, pompa, dan sistem distribusi, Biaya pengolahan air, termasuk bahan kimia dan energi. Biaya tenaga kerja. Kenaikan biaya operasional PDAM dapat terjadi akibat berbagai faktor seperti: Kenaikan harga bahan baku atau energi yang tidak selalu mencerminkan tingkat inflasi umum. Kebutuhan peremajaan infrastruktur karena usia infrastruktur atau peningkatan kapasitas layanan. Faktor-faktor ini bersifat spesifik pada industri air minum, sehingga kenaikan tarif lebih berkaitan dengan kebutuhan operasional dan pengelolaan aset daripada inflasi.

Regulasi dan Penyesuaian Retribusi

Kenaikan tarif retribusi Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa Kabupaten Kebumen diatur oleh pemerintah daerah melalui kebijakan tertentu, yang sering kali mempertimbangkan: **Keterjangkauan dan Keadilan**, tarif dikatakan terjangkau, apabila pengeluaran rumah tangga per bulan untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum tidak melebihi 4% dari pendapatan masyarakat pelanggan (maksimum 4% x UMK). **Efisiensi Pemakaian Air**, untuk efisiensi pemakaian air dicapai melalui tarif progresif. Tarif progresif dikenakan kepada pelanggan yang konsumsinya melebihi standar kebutuhan pokok air minum. Maka pelanggan yang memakai air melebihi kebutuhan dasar dikenakan tarif lebih tinggi. **Transparansi dan Akuntabilitas**, Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa Kabupaten Kebumen mempersiapkan sosialisasi dan menyampaikan informasi kepada pelanggan serta pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) secara jelas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan perhitungan dan penetapan tarif dasar air. **Mutu Pelayanan**, sebagai wujud dari kenaikan tarif dasar air, maka perusahaan akan mampu meningkatkan mutu pelayanan. **Perlindungan Air Baku**, perumda Air Minum Kebumen akan mampu meningkatkan kelestarian lingkungan khususnya di daerah tangkapan air. **Standar Kebutuhan Dasar Air Minum** "*Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebanyak 10 meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya.*" (Permendagri No

71 Tahun 2016), **Keuntungan/Laba yang Wajar**, keuntungan/laba saat ini masih disokong dari pendapatan non air dan pendapatan lain-lain (bukan dari pendapatan air saja). Karena tarif retribusi ini diatur secara administratif, penyesuaiannya sering kali tidak mengikuti dinamika inflasi, melainkan didasarkan pada evaluasi periodik atas kondisi keuangan dan operasional Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa Kabupaten Kebumen.

Fokus pada Keberlanjutan Layanan

Salah satu alasan utama kenaikan tarif retribusi Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa Kabupaten Kebumen adalah kebutuhan untuk mendukung keberlanjutan layanan, termasuk: **Investasi dalam pengembangan sistem distribusi** untuk melayani lebih banyak pelanggan. **Peningkatan kualitas air**, yang memerlukan teknologi dan bahan tambahan. **Pencapaian standar pelayanan minimum** sesuai peraturan yang berlaku. **Full cost Recovery (FCR)**, kebijakan atau pendekatan keuangan di mana tarif air yang dikenakan kepada pelanggan mencakup seluruh biaya operasional, pemeliharaan, penyusutan aset, dan investasi yang diperlukan untuk keberlanjutan layanan air. Konsep ini bertujuan memastikan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa Kabupaten Kebumen dapat beroperasi secara mandiri tanpa bergantung pada subsidi atau bantuan keuangan dari pemerintah atau pihak lain. Faktor keberlanjutan ini lebih berkaitan dengan strategi jangka panjang daripada dampak langsung inflasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*literature review*). Pengumpulan data yang digunakan untuk memahami dan menelaah teori-teori dari berbagai sumber yang berhubungan dengan studi ini (Adlini, Dinda, Yulinda, Chotimah, & Merliyana, 2022). Adapun sumber sekunder yang kami peroleh melalui pendekatan kepustakaan (*literature*). Informasi yang relevan dengan permasalahan kami himpun dari berbagai sumber. Data ini berupa buku-buku *literature*, jurnal-jurnal terkait, tugas akhir dan studi Pustaka lainnya yang relevan dengan obyek yang kami teliti.

Sumber data terdiri dari buku akademik dan artikel jurnal yang relevan dengan tema tarif air, inflasi, kebijakan publik, dan pengelolaan perusahaan daerah. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan merumuskan tema-tema teoretis dan empiris yang saling berhubungan, serta mengekstraksi temuan dari berbagai studi sebelumnya untuk membentuk pemahaman konseptual dan praktis (Adlini et al., 2022).

ANALISA DAN PEMBAHASAN

Analisis Hubungan Kenaikan Tarif Retribusi Dengan Inflasi

Di Indonesia, inflasi sering kali dikaitkan dengan berbagai faktor, termasuk kebijakan fiskal, moneter, dan penyesuaian tarif retribusi layanan publik. Salah satu layanan publik yang kerap menjadi sorotan adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Namun, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kenaikan tarif retribusi PDAM tidak memiliki hubungan langsung dengan tingkat inflasi di Indonesia.

Kenaikan tarif PDAM biasanya dilakukan untuk menyesuaikan biaya operasional dan meningkatkan kualitas layanan, tetapi dampaknya terhadap inflasi tidak signifikan. Hal ini disebabkan oleh proporsi pengeluaran rumah tangga untuk layanan PDAM yang relatif kecil dibandingkan dengan pengeluaran untuk kebutuhan pokok lainnya seperti makanan dan energi.

Kenaikan tarif retribusi merupakan salah satu kebijakan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) (Atmadja, 1999). Kebijakan ini sering diterapkan untuk membiayai pelayanan publik atau membangun infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat. Namun, dampak dari kenaikan tarif tidak hanya terbatas pada peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi ekonomi makro, termasuk tingkat inflasi. Untuk itu penting dalam memahami hubungan antara kebijakan kenaikan tarif dengan tingkat inflasi agar pemerintah dapat mengambil langkah yang tepat dalam menjaga stabilitas ekonomi (Leilani Laksmi Mulya & Wulandari, 2023).

Pengukuran Dampak Langsung dan Tidak Langsung

Sulit untuk mengukur dampak langsung kenaikan tarif retribusi terhadap inflasi, karena inflasi dipengaruhi oleh banyak faktor lain seperti harga energi, bahan baku, dan nilai tukar mata uang (Wells & Krugman, 2019). Tantangan ini semakin kompleks ketika dampak kenaikan retribusi terjadi secara tidak langsung melalui peningkatan biaya produksi di sektor lain (Samuelson, P.A. Nordhaus, 2010).

Keseimbangan Antara Pendapatan Daerah dan Beban Masyarakat

Pemerintah daerah menghadapi dilema antara kebutuhan untuk meningkatkan pendapatan melalui retribusi dan menjaga agar kenaikan tersebut tidak terlalu membebani masyarakat (Anandasari, 2016). Jika kenaikan tarif retribusi terlalu tinggi, daya beli masyarakat dapat melemah, yang pada akhirnya dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi lokal (Utomo, 2013).

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak pemerintah daerah di Indonesia yang menaikkan tarif retribusi untuk mendanai proyek-proyek pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kualitas layanan publik (Maulana & Maulana, 2024). Dengan memahami hubungan antara kenaikan tarif retribusi dan inflasi, pemerintah daerah dapat merancang kebijakan yang lebih seimbang, mengurangi risiko inflasi yang tidak terkendali, serta memastikan bahwa kenaikan tarif retribusi tetap diterima oleh masyarakat (Hafidz Meiditambua Saefulloh et al., 2023). Di tingkat industri, sektor-sektor seperti manufaktur, konstruksi, dan jasa yang bergantung pada layanan publik tertentu akan dapat mempersiapkan diri terhadap dampak biaya yang mungkin timbul dari kenaikan retribusi (Fadila & Purnamasari, 2021).

Di Indonesia, kenaikan tarif retribusi telah diterapkan di berbagai daerah dengan dampak yang beragam terhadap inflasi. Misalnya, penelitian oleh RS, Prawidya Hariani (2011) menunjukkan bahwa kenaikan tarif retribusi air bersih di Sumatera Utara menyebabkan peningkatan inflasi regional sebesar 0,5%. Dampak ini lebih terasa di daerah dengan ketergantungan tinggi pada layanan publik yang dikenai retribusi.

Dalam konteks tarif retribusi Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa Kabupaten Kebumen, kontribusinya terhadap IHK relatif kecil. Bahkan jika terjadi kenaikan tarif retribusi, dampaknya terhadap inflasi agregat cenderung tidak signifikan. Hal ini berbeda dengan kenaikan

harga energi atau bahan makanan yang memiliki bobot besar dalam IHK dan langsung memengaruhi inflasi (Hafidz Meiditambua Saefulloh et al., 2023). Berikut adalah analisis apakah kenaikan tarif air dapat menyebabkan inflasi:

Proporsi Pengeluaran Air Minum yang Kecil dalam IHK

Salah satu alasan utama kenaikan tarif air minum tidak memengaruhi inflasi adalah rendahnya kontribusi air minum terhadap total pengeluaran rumah tangga yang dihitung dalam IHK. Dalam konteks Kabupaten Kebumen, air minum cenderung memiliki porsi yang sangat kecil dalam struktur biaya hidup masyarakat, dibandingkan dengan kebutuhan pokok lain seperti makanan, transportasi, atau perumahan. Sebagai ilustrasi, jika proporsi air minum hanya mencakup 1-2% dari total pengeluaran rumah tangga, maka kenaikan tarif sebesar 10% hanya akan berdampak sangat kecil terhadap keseluruhan indeks.

Skala Kenaikan Tarif yang Terbatas. Jika kenaikan tarif dilakukan secara bertahap atau dalam skala kecil, dampaknya pada pengeluaran rumah tangga menjadi minimal. Kenaikan yang moderat memungkinkan masyarakat menyesuaikan anggaran tanpa menurunkan daya beli secara signifikan (Fadila & Purnamasari, 2021).

Pengendalian Konsumsi Air Minum. Konsumsi air minum cenderung tidak elastis (inelastis), artinya perubahan tarif tidak secara drastis memengaruhi jumlah air yang digunakan oleh rumah tangga (Utomo, 2013). Karena itu, meskipun tarif meningkat, dampak ekonominya cenderung tetap terkendali.

Tidak Ada Efek Domino pada Harga Barang/Jasa Lain. Kenaikan tarif air minum di Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa tidak berdampak signifikan pada sektor ekonomi lain, seperti produksi barang dan jasa (He & Lee, 2022). Hal ini karena sebagian besar bisnis di Kebumen tidak terlalu bergantung pada pasokan air minum dari Perumda Air Minum TBS untuk operasionalnya.

Mitigasi oleh Pemerintah Daerah. Dalam beberapa kasus, pemerintah daerah mungkin memberikan subsidi atau menerapkan subsidi silang untuk memastikan kenaikan tarif tidak memberatkan kelompok rentan (Maulana & Maulana, 2024). Langkah ini membantu menjaga stabilitas daya beli masyarakat sehingga dampak inflasi dapat dihindari.

Pembahasan

Studi Kasus-Kabupaten Kebumen

Beberapa faktor yang spesifik di Kabupaten Kebumen mendukung analisis bahwa kenaikan tarif air minum tidak berdampak pada inflasi: **Profil Sosial-Ekonomi Masyarakat:**, sebagian besar penduduk Kebumen berpenghasilan menengah ke bawah dan bekerja di sektor pertanian. Namun, pengeluaran untuk air minum biasanya tetap terjangkau karena tarif air di PDAM umumnya lebih rendah dibandingkan air kemasan atau air swasta. **Efisiensi PDAM:**, Jika Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa sudah menjalankan operasi yang efisien, kenaikan tarif hanya mencerminkan kebutuhan penyesuaian inflasi yang moderat.

Skema Bertahap, kebijakan tarif bertahap yang diterapkan memungkinkan masyarakat menyesuaikan anggaran secara bertahap, sehingga tidak menimbulkan gejolak dalam pola konsumsi atau pengeluaran. Berikut ini tabel penyesuaian/kenaikan tarif semua kelompok

pelanggan rumah tangga selama 3 tahun (2023, 2024, dan 2025) dengan perhitungan UMK Tahun 2022 masih terjangkau (dibawah 4%).

Tabel 1. Perhitungan Penyesuaian Tarif Biaya Yang Ditanggung Pelanggan

Kelompok	Rupiahn (rp)				
	Tarif Lama (2022)	Tarif Baru (2023)	Tarif Baru (2024)	Tarif Baru (2025)	4% UMK Tahun 2022
RT A1	47.500	51.000	51.000	59.000	76.271
RT A2	49.500	53.500	53.500	62.500	76.271
RT A3	55.000	59.500	59.500	69.500	76.271
RT A4	56.500	61.000	61.000	71.000	76.271
RT A5	57.500	62.500	62.500	73.500	76.271

Sumber: Perumda AM TBS, 2024

Indikator Dan Data Pendukung, Proporsi Air Minum dalam Struktur Pengeluaran, data BPS atau survei pengeluaran rumah tangga menunjukkan bahwa proporsi air minum dalam total pengeluaran rumah tangga relatif kecil. Misalnya, jika pengeluaran air hanya sekitar 1% dari total pengeluaran, maka dampaknya terhadap IHK tidak signifikan. **Tren Inflasi Sebelumnya,** jika tren inflasi tetap stabil atau tidak mengalami kenaikan signifikan meskipun tarif air meningkat, ini menunjukkan bahwa dampak kenaikan tarif tersebut bersifat marginal. **Respon Konsumen,** survei dapat menunjukkan bahwa konsumen cenderung tidak mengurangi konsumsi barang lain akibat kenaikan tarif air minum, sehingga tidak ada efek signifikan pada permintaan barang lain yang bisa memicu inflasi.

Analisis Ekonomi: Kenaikan Tarif Retribusi Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa Kabupaten Kebumen Dan Inflasi

Kenaikan tarif retribusi Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa Kabupaten Kebumen tidak memiliki hubungan langsung dengan inflasi karena beberapa alasan utama: **Proporsi Pengeluaran Kecil.** Pengeluaran rumah tangga untuk air bersih relatif kecil dibandingkan dengan kebutuhan lainnya. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), komponen utilitas dalam IHK hanya mencakup sekitar 5% dari total pengeluaran rumah tangga. **Dampak Terbatas pada Biaya Produksi.** Tarif retribusi Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa Kabupaten Kebumen yang naik tidak secara langsung memengaruhi sektor industri karena sebagian besar industri besar menggunakan sumber air alternatif seperti air tanah atau instalasi pengolahan mandiri. **Kenaikan Tarif Retribusi yang Bertahap.** Kebijakan kenaikan tarif retribusi Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa Kabupaten Kebumen biasanya dilakukan secara bertahap untuk mengurangi dampak ekonomi pada masyarakat. Menurut teori ekonomi klasik, kenaikan biaya input cenderung mengurangi efisiensi pasar, yang pada akhirnya memengaruhi keseimbangan antara penawaran dan permintaan (Krugman & Wells, 2012). Dalam konteks Indonesia, implementasi kenaikan tarif retribusi harus mempertimbangkan dampak ini agar tidak memperburuk ketimpangan ekonomi atau menurunkan daya saing daerah.

Studi Kasus-Di Indonesia

Studi menunjukkan bahwa meskipun tarif PDAM di beberapa kota besar di Indonesia naik, dampaknya terhadap inflasi regional hampir tidak terdeteksi (Aksan & Marliyah, 2024; Maulana & Maulana, 2024). Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa mayoritas konsumen PDAM adalah rumah tangga dengan konsumsi air dalam batas wajar, sehingga kenaikan tarif tidak memberikan tekanan signifikan pada pengeluaran mereka.

Jakarta, kenaikan tarif retribusi PDAM di Jakarta pada tahun 2019 sebesar 20% untuk beberapa kategori pelanggan tidak memengaruhi inflasi secara signifikan. Menurut laporan BPS, inflasi Jakarta pada tahun tersebut tetap berada dalam target yang ditetapkan Bank Indonesia, yaitu $3,5\% \pm 1\%$.

Surabaya, kenaikan tarif retribusi PDAM pada tahun 2021 sebesar 15% juga tidak memberikan kontribusi besar terhadap inflasi lokal. Penelitian oleh Atmadja (1999) menemukan bahwa pengeluaran air bersih hanya mencakup 3% dari total pengeluaran rumah tangga di kota tersebut.

Tabel 2. Subsidi Tariff

No.	Uraian	Satuan	Perhitungan	
			HPP	HPP Inflasi
1	Biaya Usaha	Rp	32.421.184.218	32.421.184.218
2	Faktor Inflasi	%	-	5.88%
3	Perkiraan biaya pada periode tarif	RP	32.421.184.218	32.421.184.218
4	Jumlah air di produksi	M3	6.868.361	6.868.361
5	Hasil Tarif Dasar (TD)	Rp	4.720	4.720
6	Tarif yang diberlakukan RT A1	Rp	3.100	3.100
7	Subsidi per m3 RT A1 (5-6)	Rp	1.620	1.898
8	Tarif yang diberlakukan Sosial Khusus	Rp	1.600	1.600
9	Subsidi per m3 Sosial Khusus	Rp	3.120	3.398

Sumber: Perumda AM TBS

Relevansi Dengan Kebijakan Publik. Penyesuaian tarif retribusi Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa Kabupaten Kebumen sering kali diperlukan untuk menjaga keberlanjutan operasional dan meningkatkan layanan. Namun, kebijakan ini tidak perlu dikhawatirkan akan memicu inflasi. Sebaliknya, fokus seharusnya diberikan pada pengelolaan harga komoditas yang memiliki bobot besar dalam IHK, seperti makanan dan energi. Kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilitas inflasi dapat lebih efektif jika diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki dampak langsung terhadap pengeluaran mayoritas rumah tangga. Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kenaikan tarif retribusi untuk mendukung layanan yang lebih baik juga dapat membantu mengurangi resistensi terhadap kebijakan tersebut.

SIMPULAN

Kenaikan inflasi disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari sisi permintaan maupun penawaran, serta kebijakan ekonomi dan kondisi eksternal. Inflasi dapat terjadi akibat ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran, gangguan rantai pasok, kenaikan biaya

produksi, kebijakan moneter dan fiskal, serta ekspektasi masyarakat. Memahami faktor-faktor ini penting bagi pemerintah dan bank sentral untuk merancang kebijakan yang dapat mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi.

Kenaikan tarif retribusi air kecil kemungkinannya menjadi penyebab inflasi, dampaknya cenderung terbatas dan tidak dominan dibandingkan dengan faktor lain seperti harga pangan, bahan bakar, dan energi. Efeknya lebih terasa dalam konteks inflasi berbasis penawaran (*cost-push inflation*) jika kenaikan tersebut meningkatkan biaya produksi di berbagai sektor. Namun, dalam skala nasional, pengaruh kenaikan tarif retribusi air terhadap inflasi umumnya bersifat marginal, kecuali jika kenaikan tersebut sangat besar dan meluas.

Kenaikan retribusi Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa Kabupaten Kebumen lebih berkaitan dengan kebutuhan operasional, keberlanjutan, dan regulasi daripada inflasi. Meskipun inflasi dapat memengaruhi beberapa komponen biaya Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa Kabupaten Kebumen, dampaknya sering kali tidak signifikan atau langsung. Oleh karena itu, kenaikan tarif Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa Kabupaten Kebumen sebaiknya dipahami sebagai bagian dari upaya untuk memastikan layanan air bersih yang berkelanjutan dan berkualitas, dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat untuk membayar.

Kenaikan tarif retribusi Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa Kabupaten Kebumen tidak memiliki hubungan signifikan dengan inflasi di Kabupaten Kebumen. Hal ini disebabkan oleh kontribusinya yang kecil terhadap pengeluaran rumah tangga dan IHK. Dengan demikian, kebijakan penyesuaian tarif Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa Kabupaten Kebumen dapat dilakukan tanpa kekhawatiran berlebihan terhadap dampaknya pada stabilitas harga secara keseluruhan.

REFERENSI

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Aksan, M., & Marliyah, M. (2024). Dampak Kebijakan Tarif PDAM Tirtanadi Terhadap Kepuasan Pelanggan: Studi Kasus PDAM Tirtanadi Cabang Medan Denai. *SANTRI: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(1), 340–352.
- Anandasari, Y. (2016). *Analisis Dampak Penentuan Tarif Air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)*. Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya.
- Atmadja, A. S. (1999). Inflasi di Indonesia dan sumber sumber penyebabnya. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 54–67.
- Blanchard, O., & Sheen, J. (2013). *Macroeconomics; Australasian Edition*. Pearson Higher Education AU.
- Fadila, A. S., & Purnamasari, A. (2021). Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 7(1), 17–28. Retrieved from www.bps.go.id,
- Hafidz Meiditambua Saefulloh, M., Rizah Fahlevi, M., & Alfa Centauri, S. (2023). Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Perspektif Indonesia. *Jurnal Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 17–26.
- He, Y., & Lee, M. (2022). Macroeconomic Effects of Energy Price: New Insight from Korea? *Mathematics*, 10(15), 2653. <https://doi.org/10.3390/math10152653>

- Kharisma, N., Furqon, I. K., Abdurrahman, U. K. H., & Pekalongan, W. (2023). Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Masyarakat Dan Inflasi Di Indonesia. *Jurnal Sahmiyya*, 2, 295–303.
- Leilani Laksmi Mulya, D., & Wulandari, I. (2023). Pengaruh Retribusi Pelayanan Pasar dan Pelayanan Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan Inflasi sebagai Moderasi. *Jurnal Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 5(2), 347–356. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v5i2.4480>
- Mankiw, N. G. (2020). *Pengantar ekonomi makro*. Salemba Empat.
- Maulana, A. W., & Maulana, I. S. (2024). Dinamika Inflasi Di Indonesia Terhadap Daya Beli Masyarakat Pada Tinjauan Ekonomi Makro. *Moneter: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 2(2), 20–29. Retrieved from <https://doi.org/10.61132/moneter.v2i2.437>
- RS, P. H. (2011). Analisis Pola Dan Struktur Inflasi Kota Medan. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 15–35.
- Samuelson, P.A. Nordhaus, W. D. (2010). *Macroeconomics* (McGraw-Hil). Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=WVJRPgAACAAJ>
- Utomo, T. P. (2013). Analisis Kenaikan Tarif Air Pdam Kabupaten Lamongan Tahun 2013. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 1–19. Retrieved from [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=285255&val=6467&title=ANALISIS KENAIKAN TARIF AIR PDAM KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2013](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=285255&val=6467&title=ANALISIS%20KENAIKAN%20TARIF%20AIR%20PDAM%20KABUPATEN%20LAMONGAN%20TAHUN%202013)
- Wells, R., & Krugman, P. R. (2019). *Macroeconomía*. Reverte.
- Yanti, D., & Ghozali, R. (2020). Analisis Faktor Capaian Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Angkutan Sungai dan Penyeberangan pada Dinas Perhubungan Kota Palembang. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5(2), 121–129. <https://doi.org/10.33105/itrev.v5i2.168>